

KPK Periksa Bendahara Yayasan dan Dosen Terkait Suap Penerimaan Mahasiswa Unila

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.

Keduanya saksi tersebut terdiri dari Ary Meizari Alfian selaku Bendahara Yayasan Alfian Husin dan Muallimin selaku Dosen.

"Hari ini pemeriksaan saksi TPK suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022, untuk tersangka KRM," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (21/9).

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap delapan saksi. Mayoritas saksi yang dipanggil untuk diperiksa yakni para dosen.

Adapun, delapan saksi tersebut yakni, Dyah Wulan Sumekar sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, M Fakhri sebagai Dekan Fakultas Hukum, Patuan Raja sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Helmy Fitriawan sebagai Dekan Fakultas Teknik, serta Irwan Banuwa yang merupakan Dekan

Fakultas Pertanian.

Selain para dekan, KPK juga memanggil Staf Pembantu Rektor I Unila, Tri Widioko; seroang Dosen, Muallimin; dan Kepala Biro (Kabiro) Perencanaan dan Humas Universitas Lampung, Budi Utomo. Keterangan mereka dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Karomani (KRM).

Sebelumnya, KPK berhasil mengamankan dokumen hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) serta dana iuran Uang Kuliah Tunggal (UKT) usai mengeledah dua rumah di daerah Lampung pada Selasa (13/9).

Pengeledahan tersebut masih berkaitan dengan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022 yang menjerat rektornya, Karomani (KRM). Sayangnya, belum diketahui dengan pasti rumah siapa yang turut digeledah tersebut.

"Pengeledahan rumah di Jalan Nusantara Gang Cemara Nomor 11 Bandar Lampung dan rumah Jalan Duren 11 blok E Jati Agung Lampung Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (14/9). ■ mei

Kalau Mau Hattrick Menang Pemilu, PDIP Diminta Pilih Ganjar Pranowo

JAKARTA (IM) - Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenzer atau Noel berpendapat, hendaknya elite PDI-P mendengar suara rakyat untuk mengukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024 dibandingkan Ketua DPR Puan Maharani.

Pasalnya, Noel mengingatkan bahwa PDI-P ingin memenangkan Pemilu untuk ketiga kalinya pada tahun 2024. "(PDI-P) Partai yang mau hattrick di 2024, apalagi tema mereka kan 2024 hattrick ya kan. Nah kalau mau hattrick, riset beberapa lembaga survei itu, mas Ganjar elektabilitasnya tinggi," kata Noel saat dihubungi wartawan, Rabu (21/9).

Noel menyatakan hal itu ketika diminta tanggapan soal terbentuknya Dewan Kolonel, sebuah kelompok dari beberapa anggota Fraksi PDI-P DPR untuk mendukung Puan sebagai capres.

Menurutnya, Dewan Kolonel itu menandakan suara dari elite PDI-P pen-

dukungan Puan. Ia menilai, jika PDI-P pada akhirnya mengukung Puan, maka akan menurunkan elektoral partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebab, elektabilitas Puan dinilai lebih rendah daripada Ganjar jika dilihat dari hasil sejumlah survei nasional.

"Kalau seandainya PDI-P tidak mengukung sosok yang tidak memiliki dampak elektoral, ya itu pasti nyungsep. Apalagi di era digital begini," ungkapnya.

"Begitu, elite ini jangan bermain-main lah dengan suara rakyat. Apalagi di era digital begini," ujarnya.

Lebih lanjut, Noel tak masalah jika pada akhirnya PDI-P tetap menajutkannya pilihannya pada Puan Maharani. Namun, kata dia, keputusan itu dikhawatirkan berdampak buruk bagi elektoral PDI-P. "Tahun 2024 kalau PDI-P mau ditinggalkan oleh rakyat, ya silakan saja usung yang kandidat yang tidak memiliki elektabilitas dan tidak memiliki dampak elektoral," katanya. ■ han

2 Polhukam

FOTO/ANT



KPK Sebut Dugaan Korupsi Lukas Enembe Masih Banyak Lagi, Bukan Hanya Rp1 Miliar

Penyidik KPK akan mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang berhalangan hadir pada pemeriksaan pertama.

JAKARTA (IM) - KPK masih terus menelusuri dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. Memang menurut KPK, awalnya dugaan korupsi Lukas Enembe yang terendus hanya Rp 1 miliar.

"Anggapannya bahwa tersangka LE itu hanya melakukan korupsi senilai Rp1 miliar. Dan kenyataannya Rp1 miliar memang di awal," kata Depu-

ti Bidang Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Rabu (21/9).

Karyoto menerangkan, bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan secara terus-menerus.

"Nanti untuk pengembangan akan banyak sekali, bahkan pada saat ini, KPK telah mengambil alih pemblokiran," terangnya.

"Sekarang sudah dilakukan pemblokiran oleh penyidik di KPK senilai Rp 71 miliar atas beberapa jasa dan perbankan maupun asuransi," katanya.

Pemeriksaan Ulang Sementara itu, KPK akan mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang berhalangan hadir untuk pemeriksaan pertama.

"Yang jelas saya tidak akan mengatakan, nanti akan ini, nanti akan ini. Yang akan saya lakukan di tahap ini, setelah panggilan pertama tidak datang, kita panggil," kata Deputy Bidang Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Rabu (21/9).

"Panggilan kedua, yang akan dilayangkan mungkin besok akan dilayangkan ke Papua, dan waktu datang di minggu berikutnya, Senin atau Selasa," terangnya.

Menurutnya, panggilan tersebut sudah diumumkan, yakni Stefanus Roy Rening. Dia menerima surat KPK yang menyatakan Lukas Enembe resmi jadi tersangka sejak 5 September 2022.

"Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September, Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya," kata Roy saat itu. ■ han

akan tergantung dengan situasi kondisi, akan bisa berkembang," katanya.

Kabar Lukas Enembe menjadi tersangka KPK pertama kali disampaikan oleh koordinator kuasa hukumnya, yakni Stefanus Roy Rening. Dia menerima surat KPK yang menyatakan Lukas Enembe resmi jadi tersangka sejak 5 September 2022.

"Saya mendapat informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan, itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September, Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya," kata Roy saat itu. ■ han

Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono Jadi Ketua Tim Pelaksana PPHAM

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Makarim Wibisono sebagai Ketua, Idrhal Kasim sebagai Wakil Ketua, Suparman Marzuki sebagai Sekretaris,

Sedangkan Anggota adalah Apolo Safanpo, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As'ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat dan Rahayu.

Dan mengusulkan rekomendasi untuk mencegah

pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan menyusun laporan akhir.

Tim pelaksana nantinya akan diberikan arahan dan kebijakan oleh Tim pengarah. Tim pengarah akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dengan Wakil ketuanya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta ang-

gotanya antara lain Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri sosial dan Kepala Staf Kepresidenan.

Tim Pelaksana akan menyampaikan laporan akhir kepada Ketua Tim Pengarah. Nantinya Ketua Tim Pengarah akan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Namun, masa

kerja Tim PPHAM dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden. Untuk biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sedangkan biaya pelaksanaan rekomendasi dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi. ■ mei

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PT ARTHAVEST Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt.55
Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220
Tel : +62-21-3111 6101

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

30 JUNI 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	76.250.921.934	74.092.029.437		
Investasi jangka pendek	11.076.480.000	11.018.790.000		
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	4.605.304.482	4.703.752.065		
Piutang lain-lain	1.067.491.410	1.009.144.358		
Persediaan	1.404.791.519	801.745.444		
Pajak dibayar di muka	414.373.660	365.916.017		
Biaya dibayar di muka	1.563.300.143	1.533.542.171		
Uang muka	98.833.864	88.111.379		
Jumlah Aset Lancar	96.481.497.012	93.613.030.871		
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi saham	25.000.000.000	25.000.000.000		
Aset pajak tangguhan - neto	29.758.548	24.564.258		
Piutang pihak berelasi	24.000.000.000	24.000.000.000		
Aset tetap - neto	227.466.284.350	235.423.848.770		
Aset hak-guna - neto	506.265.220	274.895.109		
Uang muka pembelian aset tetap	280.939.831	-		
Taksiran klaim pajak penghasilan	3.545.536.309	3.521.987.924		
Aset tidak lancar lain-lain	478.277.089	490.671.193		
Jumlah Aset Tidak Lancar	281.307.061.347	288.735.967.254		
JUMLAH ASET	377.788.558.359	382.348.998.125	377.788.558.359	382.348.998.125
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	1.622.837.014	2.236.933.334		
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.781.762.097	548.521.524		
Pihak ketiga	472.867.025	644.902.284		
Utang pajak	780.889.368	1.170.239.769		
Pendapatan diterima di muka	4.202.147.074	4.606.837.720		
Beban masih harus dibayar	1.542.161.289	1.137.864.374		
Uang titipan	500.000.000	-		
Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan	-	160.085.234		
Liabilitas sewa yang direalisasikan dalam satu tahun	186.573.992	192.931.885		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.089.237.859	10.698.316.124		
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - neto	40.828.260.582	41.030.250.200		
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	135.266.125	111.655.720		
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang direalisasikan dalam satu tahun	224.141.582	81.963.220		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.187.668.289	41.223.869.140		
Jumlah Liabilitas	53.276.906.148	51.922.185.264		
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham	-	-		
Modal dasar - 850.000.000 saham	-	-		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 446.674.175 saham	89.334.835.000	89.334.835.000		
Tambahan modal disetor - bersih	1.116.892.763	1.116.892.763		
Selisih transaksi perubahan ekuitas	-	-		
Entitas Anak	1.020.000.000	1.020.000.000		
Komponen ekuitas lain	-	-		
Penurunan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(2.700.820.000)	(2.758.510.000)		
Saldo laba	91.861.983.766	95.033.981.143		
Belum ditentukan penggunaannya	-	-		
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	750.000.000	750.000.000		
Sub-jumlah	181.382.891.529	184.497.198.906		
Kepentingan Non-Pengendali	143.128.760.682	145.929.613.955		
Jumlah Ekuitas	324.511.652.211	330.426.812.861		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022 (Enam Bulan)	2021 (Enam Bulan)
PENDAPATAN USAHA	21.864.477.058	13.117.040.850
BEBAN DEPARTEMENTALISASI		
Beban langsung		
Makanan dan minuman	(2.057.937.855)	(1.027.335.405)
Binau	(3.599.083)	(175.498)
Lain-lain	(1.777.228)	(1.845.666)
Sub-jumlah beban langsung	(2.066.314.166)	(1.203.956.569)
Gaji dan tunjangan	(27.026.085)	(2.105.653.999)
Beban departementalisasi lainnya	(1.134.198.158)	(536.632.873)
Jumlah Beban Departementalisasi	(3.277.538.409)	(3.845.243.441)
LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI	18.639.938.649	9.445.397.409
Beban penjualan dan pemasaran	(72.461.333)	(21.569.906)
Beban umum dan administrasi	(26.797.860.247)	(18.704.204.091)
Pendapatan dividen	594.453.787	2.632.403.054
Pendapatan imbalan kerja karyawan	831.330.023	(883.628.862)
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih RUGI USAHA	(6.804.599.121)	(6.089.501.887)
PAJAK PENGHASILAN	(6.189.040.951)	(5.476.030.157)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak tangguhan	209.165.314	(654.881.667)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	209.165.314	(654.881.667)
RUGI PERIODE BERJALAN	(5.979.875.637)	(6.130.911.824)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	9.006.393	(926.753.483)
Pajak penghasilan terkait	(1.981.406)	432.123.640
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Naikannya yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	57.690.000	403.830.000
Labas (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	64.714.987	(90.799.843)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(5.915.160.650)	(6.221.711.667)
RUGI PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(3.179.022.364)	(2.266.347.275)
Kepentingan Non-Pengendali	(2.800.853.273)	(3.864.564.549)
JUMLAH	(5.979.875.637)	(6.130.911.824)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(3.114.307.377)	(2.114.405.600)
Kepentingan Non-Pengendali	(2.800.853.273)	(4.107.306.067)
JUMLAH	(5.915.160.650)	(6.221.711.667)
RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	(7)	(5)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022 (Enam Bulan)	2021 (Enam Bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	22.165.366.555	8.582.341.228
Pembayaran kas kepada pemasok	(20.406.719.599)	(10.021.294.099)
Pembayaran kas kepada karyawan	(731.848.331)	(7.007.678.500)
Penerimaan dari pendapatan bunga	654.472.491	626.910.706
Pembayaran pajak penghasilan	(459.375.024)	(1.373.077.220)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(38.914.321)	(13.438.976)
Penerimaan dari penghasilan lainnya	256.136.024	2.516.898.653
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.439.117.795	(6.688.338.208)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Uang muka pembelian aset tetap	(280.939.831)	(134.636.000)
Perolehan aset tetap	(60.515.500)	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(341.455.331)	(134.636.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran atas liabilitas sewa	(186.573.992)	(252.000.000)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(186.573.992)	(252.000.000)
NAIKANNA (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	911.088.472	(7.075.974.208)
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	1.247.804.025	(93.260.024)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	74.092.029.437	77.841.604.715
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	76.250.921.934	70.672.370.483
Catatan:		
Informasi keuangan konsolidasian interim PT Arthavest Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramaharja, Pradhono & Chandira (member of Ridi International GmbH) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut, pada tanggal 21 September 2022.		
Jakarta, 22 September 2022 S. E & O. Direksi PT ARTHAVEST Tbk		